

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tuntutan terhadap manajemen keuangan daerah yang akuntabel dan transparan dewasa ini adalah salah satu konsekuensi dari desentralisasi yang dilakukan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Hal tersebut tidak terlepas dari permasalahan pengelolaan keuangan daerah yang merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Halim (2007) mendefinisikan manajemen keuangan daerah sebagai suatu pengorganisasian kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai daerah.

Pengelolaan keuangan yang baik dari suatu daerah akan memberi kesempatan daerah tersebut untuk menyediakan layanan publik yang baik terhadap masyarakat. Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001 lalu, terjadi pelimpahan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah.

Kebijakan desentralisasi didasarkan pada pertimbangan bahwa daerah lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya, sehingga pemberian otonomi terhadap daerah diharapkan dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi (Widodo *et al*, 2011).

Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, peraturan teknisnya tertuang dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian direvisi kembali menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah mengindikasikan pemberian wewenang terhadap daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, tidak terkecuali dalam mengelola keuangan daerah.

Pemberian wewenang dalam pengelolaan keuangan tersebut membuat pemerintah daerah harus melakukan pengawasan. Dalam hal ini pengawasan berupa penilaian kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban atas wewenang yang dimiliki pemerintah daerah. Penilaian kinerja pemerintah merupakan suatu hal yang menjadi fokus perhatian terutama dalam hal pengelolaan keuangan negara. Kinerja pemerintah yang dimaksud adalah bagaimana upaya pemerintah daerah dalam memperoleh dan menggunakan dana untuk melaksanakan pembangunan di daerah yang bersangkutan (Mardiasmo, 2007).

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah *self supporting*-nya dalam bidang keuangan. Sehingga, bidang keuangan merupakan salah satu bagian yang menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah dan kinerja pemerintahan suatu daerah (Kaho, 1997).

Otonomi daerah dilakukan atas dasar peningkatan pelayanan publik dan memajukan perekonomian masing-masing daerah. Jika pelayanan publik sudah baik maka peningkatan perekonomian juga akan terjadi. Menurut *United Nations*

Development Program (UNDP, 1996), hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi bersifat timbal balik, artinya apabila terdapat pertumbuhan ekonomi maka akan mempengaruhi pembangunan manusianya. Sedangkan menurut Christy dan Adi (2009), laju pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pembangunan manusia. Karena pada hakekatnya, pembangunan adalah pembangunan manusia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pertama kali diperkenalkan oleh *United Nation Development Program* (UNDP) pada tahun 1996. Katalog BPS mengenai Indeks Pembangunan Manusia menyatakan bahwa IPM digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan di suatu wilayah melalui layanan publik yang baik. IPM menjadi alat ukur yang peka untuk menggambarkan perubahan yang terjadi pada dimensi standar hidup layak. Aspek standar kehidupan tersebut dilihat dari usia yang panjang dan hidup sehat serta tingkat pendidikan yang memadai. IPM juga digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara tergolong negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang. Selain itu, menurut UNDP (1996) IPM juga digunakan untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup suatu negara.

Putra dan Ulupui (2015) menyatakan bahwa pembangunan manusia di Indonesia sebenarnya sudah menganut konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dipublikasikan oleh UNDP yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Anggraini (2015) juga melakukan penelitian yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan yang baik akan membawa dampak yang baik pula bagi tersedianya layanan publik. Alasan yang mendasarinya karena dengan layanan

publik yang baik maka diharapkan dapat meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Peningkatan aspek kehidupan masyarakat tersebut diproksikan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Penelitian ini mengacu pada penelitian Anggraini (2015) yang menggunakan sampel penelitian 33 pemerintah provinsi di Indonesia pada tahun 2010-2013. Penelitian tersebut menggunakan Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel dependen dan Rasio Keuangan Daerah sebagai variabel independen. Dalam penelitian tersebut, rasio keuangan yang digunakan adalah Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Efektivitas Pajak Daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul ***“Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat?
2. Apakah Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat?

3. Apakah Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat?
4. Apakah Rasio Efektivitas Pajak Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat.
4. Untuk mengetahui pengaruh Rasio Efektivitas Pajak Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak – pihak berikut:

1. Bagi Akademisi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi pembaca. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang.
2. Bagi Praktisi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan informasi bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam hal peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini menjelaskan tinjauan pustaka yang meliputi landasan teoritis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran penelitian, serta hipotesis penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang akan diteliti meliputi metode penelitian, jenis dan sumber data, variabel penelitian, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah dilakukan. Diikuti dengan analisis dan pembahasan yang meliputi analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi data, pembuktian hipotesis, serta pembahasan penelitian secara keseluruhan.

BAB V : Penutup

Bab ini menjelaskan kesimpulan, keterbatasan penelitian, serta saran dari penelitian ini.

